

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan enam bagian yang terdiri atas Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Disertasi. Bagian-bagian tersebut penulis uraikan sebagai berikut.

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai satu pelajaran dalam kurikulum Sistem Pendidikan Nasional merupakan rangkaian spirit perjuangan bangsa, khususnya para pendiri negara Republik Indonesia agar bangsa Indonesia dapat membangun negara dan karakter bangsa yang dicita-citakan. Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan energi yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik.

Apabila kita kaji secara historis gerakan Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, menunjukkan sikap patriotisme bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni lahirnya sebuah negara bangsa, yaitu Negara Republik Indonesia. Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia (RI) pertama dalam pidatonya menekankan perlunya *nation and character building*. Soekarno menegaskan perlunya pembangunan karakter bangsa. Bangsa Indonesia baru lepas dari penjajahan. Oleh karena itu, bangsa yang baru merdeka ini perlu memiliki ciri khas, yakni jatidiri atau kepribadian bangsa.

Pakar pendidikan Amerika, John Dewey, mengemukakan dalam buku *Democracy in Education*, yang ditulisnya pada tahun 1964, ia menjadi orang pertama yang memadukan demokrasi dan pendidikan secara bersama-sama. Sebuah pesan revolusioner dalam buku itu adalah bahwa suatu masyarakat yang demokratis harus memberikan kesempatan pendidikan yang sama, tanpa adanya diskriminasi.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya, dirintis melalui perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai Konstitusi Negara, yang dibahas dan

diterima dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta dibahas dan disahkan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Di dalam teks Proklamasi terdapat kalimat, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Dengan proklamasi tersebut berarti bangsa Indonesia memasuki kehidupan bermasyarakat berbangsa yang merdeka dan berdaulat. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRIT 1945), ditegaskan pernyataan kemerdekaan Indonesia serta pertimbangan-pertimbangan pokok yang tertera dalam alinea kesatu, kedua, ketiga, dan alinea keempat yang mengandung tujuan negara dan dasar negara Indonesia. Tujuan Negara Indonesia, dalam alinea ke empat tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”, tujuan ketiga, yaitu: “...mencerdaskan kehidupan bangsa” hal tersebut mengandung arti bahwa kehidupan yang dibangun adalah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas. Dalam konteks ini, Winataputra (2012, hlm. 8) menyatakan bahwa “kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan adalah masyarakat bangsa yang cerdas, religius, adil dan beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera.”

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantoro yang memiliki karya besar dan dijadikan landasan oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan pendidikan, khususnya kalimat *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* ( di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan). Semboyan yang paling terkenal, yaitu “*tut wuri handayani*”.

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, mampu menunjukkan dimana jati diri dengan arah tujuan yang akan dicapai oleh setiap manusia yang berdiri tegak di tanah Indonesia. Pendidikan menjadi keinginan warga negara Indonesia untuk mengenal dirinya. Hal ini sesuai dengan persepsi filsafat

bagaimana seorang manusia memanusiakan manusia yang dapat terwujud melalui pendidikan.

Setelah negara kita merdeka, bukannya tidak ada tantangan, justru tantangan dan ancaman itu lebih kuat yang datang dari dalam maupun dari luar, sehingga rasa cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme, harus terus kita pupuk dan harus ditanamkan kepada generasi muda agar menjadi warga negara yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Menurut Somantri. N (2001, hlm. 247) menyatakan;

Gelora Api Kemerdekaan harus dipelihara melalui sejarah nasional, maksudnya gelora kemerdekaan harus terus dihayati oleh generasi muda, semangat itu akan semakin memudar karena generasi muda tidak mengalaminya, tetapi hanya mendengar kisahnya. Gelora api kemerdekaan akan semakin memudar termakan waktu, yang akan mengakibatkan terjadinya persilangan. Untuk mengatasinya diperlukan terus menerus semangat api kemerdekaan ini dikobarkan melalui pelajaran sejarah nasional, serta PKn yang diarahkan agar generasi muda memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air, guru-gurunya dituntut memiliki sikap, berpengetahuan luas dan pengabdian yang tinggi (*well-informed and well-dedicated*).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatakan bahwa ;

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila memperhatikan rumusan di atas maka watak kewarganegaraan dapat ditunjukkan dengan indikator warga negara Indonesia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara khusus menegaskan bahwa PKn dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn

merupakan salah satu mata pelajaran dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1994 yang mengemban visi memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi menyatakan bahwa;

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pendidikan yang dilaksanakan bertujuan untuk mempersiapkan warga negara muda menjadi insan yang mempunyai rasa nasionalisme yang kuat, yaitu yang berkomitmen tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan tantangan. Hal tersebut sangatlah penting mengingat sejak negara kita diproklamasikan sampai sekarang selalu dihadapkan kepada berbagai tantangan dan ancaman yang mengancam integritas bangsa, sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam serta komitmen yang kuat dan konsisten terhadap semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRIT 1945.

PKn merupakan pendidikan yang membelajarkan siswa agar memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, akan tetapi kenyataan penyajian pembelajaran PKn laksana batu karang yang kuat, sulit untuk berubah walaupun dihempas gelombang inovasi pembelajaran. Guru sebagai manajer dalam pembelajaran seakan tidak termotivasi untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan pembelajaran yang mengarah kepada *student centered*, sebaiknya guru PKn memahami bagaimana melaksanakan dan mengkolaborasikan metode mengajar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Seyogyanya, dalam proses pembelajaran PKn sudah meninggalkan cara-cara konvensional, untuk

segera diubah menjadi pembelajaran yang menarik dan menantang, dengan menciptakan pembelajaran yang interkatif, yaitu pembelajaran yang dapat menciptakan komunikasi multi arah antara guru PKn dengan siswa atau antara siswa dengan siswa. Pembelajaran interaktif berpusat kepada siswa, dimana siswa diberikan kesempatan untuk belajar, mengalami, mencari tahu, bukannya diberi tahu. Pembelajaran interaktif lebih menekankan pada penggunaan metode *inquiry* serta pembelajaran berbasis masalah, siswa belajar untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Pembelajaran interaktif sangat diperlukan karena sejalan dengan perkembangan kurikulum yang mengharuskan bahwa pembelajaran berpusat kepada siswa, siswa harus lebih banyak mengalami belajar, serta pergeseran peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai fasilitator.

Guru memiliki posisi yang sangat strategis serta memegang peranan paling penting dalam pencapaian suatu program. Program unggulan apapun yang akan diterapkan, tanpa adanya dukungan dan keterlibatan tenaga guru mustahil dapat dijalankan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutisna (1993, hlm. 25) yang menyatakan;

Kualitas program pendidikan tidak hanya bergantung kepada konsep-konsep program yang cerdas tetapi juga pada tenaga edukatif yang mempunyai kesanggupan dan keinginan untuk berprestasi. Tanpa tenaga edukatif yang cakap dan efektif, program pendidikan yang dibangun di atas konsep-konsep yang cerdas serta dirancang dengan telitipun tidak dapat berhasil.

Peran guru PKn sebagai agen pembaharuan, sebagai fasilitator terciptanya situasi pembelajaran yang kondusif, sebagai pemimpin dalam penanaman nilai-nilai moral terhadap siswa, dalam pelaksanaan tugasnya dituntut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, yang merupakan seperangkat kemampuan agar layak menduduki jabatan fungsional guru. Kompetensi yang paling utama adalah penguasaan proses belajar mengajar dan penguasaan pengetahuan. Guru adalah merupakan kunci keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan. Baik buruknya perilaku dan cara mengajar akan berdampak pada citra lembaga pendidikan, oleh sebab itu sumber daya guru harus dikembangkan agar menjadi guru yang memiliki kompetensi, berkualitas, mampu melaksanakan kewajibannya secara

bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan, baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi, maupun etika.

Sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat, jabatan guru juga menuntut profesional. Guru PKn yang profesional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan tetapi mentransformasikan kebudayaan itu ke arah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing. Guru profesional bukan lagi merupakan sosok yang berfungsi sebagai robot, tetapi merupakan dinamisor yang mengantar potensi-potensi siswa ke arah kreativitas.

Peran yang esensial dari guru PKn dalam melaksanakan proses belajar mengajar perlu didukung oleh kompetensi guru dalam mengimplementasikan program pembelajaran. Hal ini seperti tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut Buchari (2008, hlm. 123) menyatakan bahwa : “Kompetensi guru merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh setiap guru PKn, dan kompetensi guru tidak semata-mata didapatkan begitu saja, tetapi harus ada usaha yang keras untuk memperolehnya”. Pada akhirnya kompetensi guru merupakan tolak ukur untuk menentukan kualitas guru.

Penjabaran kompetensi guru menurut UU No. 14 Tahun 2005, ada empat dimensi kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran siswa, serta Depdiknas (2004, hlm. 9) menyebutkan kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran”.. Kedua, kompetensi kepribadian, dimensi ini merupakan kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi siswa. Ketiga, kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam, dan keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi serta berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar.

Proses pembelajaran PKn, di era reformasi banyak tantangan. PKn telah mengalami pergeseran tugas dan fungsinya, yang sebelumnya lebih ditekankan kepada pendidikan indoktrinasi, dengan paradigma baru menjadi bidang kajian ilmiah pada program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama

dan esensi pendidikan demokrasi. Sebagai bidang kajian ilmiah, materi PKn di sekolah dapat diperdebatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebenaran nalar dan kebutuhan siswa. Guru PKn diberi kesempatan untuk mengembangkan daya nalar dan kreativitasnya dalam mengembangkan serta menterjemahkan materi PKn kepada siswa. PKn sebagai wahana utama dan esensi pendidikan demokrasi harus dimaknai bahwa proses pembelajaran PKn dengan cara-cara konvensional harus ditinggalkan. Sebagai contoh dari pembelajaran PKn yang konvensional menjadikan PKn merupakan pelajaran yang membosankan dan tidak menarik, diantaranya; belajar harus selalu dalam kelas, terkesan metode duduk dengar catat hafal (DDCH), guru aktif menerangkan (*teacher centered*), pembelajaran harus mencapai target kurikulum, sementara kompetensi siswa terabaikan. Guru PKn sebaiknya efektif membangun siswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik, yaitu warga negara yang memiliki akhlak mulia dan berkarakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang tersirat dalam buku Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 (Depdiknas, 2006, hlm. 31) bahwa:

Salah satu sebab rendahnya mutu lulusan adalah belum efektifnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran selama ini masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan dalam semua bidang studi yang menyebabkan kemampuan belajar siswa menjadi terhambat. Metode pembelajaran yang terlalu berorientasi pada guru (*teacher oriented*) cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan mencerdaskan menjadi kurang optimal.

Dari pernyataan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang tersirat tersebut memang benar adanya. Seandainya guru sebagai pemegang peran utama dalam pembelajaran tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran maka mutu lulusan tidak akan sesuai dengan standar kelulusan.

Proses pembelajaran di dalam kelas kurang mendapat perhatian dari orang tua dan pemerintah, yang penting hasil Ujian Nasional. Pada umumnya pembelajaran dilakukan dalam bentuk satu arah, guru PKn lebih banyak ceramah dihadapan siswa, sementara siswa mendengarkan. Guru kurang memberi inspirasi

kepada siswa untuk berkreasi dan kurang melatih siswa untuk hidup mandiri. Pembelajaran yang disajikan guru kurang menantang siswa untuk berpikir, akibatnya siswa tidak menyenangi pelajaran. Pengawas, kepala sekolah pada umumnya mementingkan dokumen administrasi guru, dari pada masuk kelas melakukan observasi dan supervisi terhadap proses pembelajaran, berarti selama ini kita kurang memperhatikan pentingnya proses pembelajaran dan hasil tes merupakan dampak dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik seharusnya menghasilkan nilai tes yang baik. Paradigma yang hanya mementingkan hasil tes harus segera diubah menjadi memperhatikan proses pembelajaran.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru serta mutu pendidikan, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU tersebut dituntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru agar menjadi profesional. Pengakuan terhadap guru PKn sebagai tenaga profesional akan diberikan manakala guru PKn telah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik yang dipersyaratkan (Pasal 8), kualifikasi akademik "diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat" (Pasal 9). Sertifikat Pendidik diperoleh guru setelah mengikuti pendidikan profesi [(Pasal 10 ayat (1))]. Selain itu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dalam Pasal 19 ayat (1) berbunyi :

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Dari bunyi ayat tersebut, mengindikasikan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap mutu proses pembelajaran. Tantangan bagi kita adalah bagaimana mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta memahaminya tidak bagian-bagian tertentu, akan tetapi harus secara menyeluruh.

Dalam pembelajaran PKn di sekolah, masih ada kesenjangan antara laporan prestasi belajar mata pelajaran PKn dengan perilaku moral, tentunya yang diharapkan adanya keselarasan dengan prestasi yang dicapainya. Seandainya siswa memperoleh nilai 80-90 (baik) maka semestinya perilaku yang ada mencerminkan hasil dari nilai tersebut. Sebaliknya siswa yang mendapat nilai kurang tidaklah berarti bahwa keutuhan perilaku kewarganegaraan siswa tersebut berada pada taraf yang rendah. Indikasi penilaian PKn yang relatif mengutamakan aspek kognitif kurang memadai, sehingga perlu kajian secara terpadu upaya membentuk kepribadian warga negara secara utuh sebagaimana diharapkan dalam misi dan tujuan PKn.

PKn yang memiliki visi yang tercantum dalam Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional, disebutkan, "terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara". Lebih lanjut dalam Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1), secara khusus ditegaskan bahwa PKn dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn merupakan salah satu mata pelajaran dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1994 yang mengemban visi memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam kerangka *nation and character building*, yang merupakan sarana untuk membentuk kepribadian bangsa. PKn mengemban misi *Civic Education for Democration* dan *Value-Based Education*. Winataputra (2006, hlm. 1) menegaskan, bahwa; tugas PKn dengan paradigma baru diarahkan pada pengembangan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni (1) mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), (2) membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), (3) mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk *good citizens*, bukan hanya dalam dimensi rasional yang selama ini terjebak dalam budaya verbalistik tetapi juga meliputi dimensi spiritual, emosional, dan sosial, sehingga paradigma baru yang dikembangkan dalam PKn akan bercirikan multidimensional. PKn merupakan salah satu kajian yang mengembangkan misi

nasional untuk mencerdaskan bangsa Indonesia melalui koridor ‘*value-based education*’ (Budimansyah dan Suryadi, 2008, hlm. 11).

Upaya pembinaan karakter bangsa merupakan ciri khas dan sekaligus amanah yang diemban mata pelajaran PKn atau *Civic Education* pada umumnya. Misi mata pelajaran PKn, yaitu membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Untuk mewujudkan misi di atas, jelas bahwa siswa harus memiliki kemampuan kewarganegaraan yang multidimensional agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam berbagai aspek kehidupan.

Sementara itu, mata pelajaran PKn berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Melalui mata pelajaran PKn diharapkan siswa bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang materi pokok PKn yang meliputi politik, hukum, moral (pengetahuan kewarganegaraan), tetapi juga memiliki keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, hukum, moral, dan terampil menggunakan hak dan kewajibannya di bidang politik, hukum, dan moral (keterampilan kewarganegaraan). Selain itu, melalui PKn diharapkan siswa memiliki sikap, rasa tanggung jawab, hormat dan taat terhadap peraturan yang berlaku (watak kewarganegaraan).

PKn merupakan sarana pendidikan yang efektif dan strategis bagi negara-negara demokratis untuk melahirkan generasi muda dan masyarakat luas agar memiliki pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan yang diperlukan dalam mentransformasikan, mengaktualisasikan, melestarikan demokrasi, serta penghormatan, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, PKn dapat menjadi pilar bagi tegaknya nilai demokrasi yang berkeadaban. PKn harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen pendidikan politik yang mampu melakukan *empowerment* bagi masyarakat. Dengan cara demikian, berbagai patologi sosial (penyakit masyarakat) dapat dianalisis untuk kemudian

dicarikan solusi atau terapinya. Selain itu PKn harus dapat dijadikan wahana dan instrumen untuk melakukan *sosial engineering* dalam rangka membangun kemampuan sosial yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta tumbuhnya masyarakat madani (*civil society*).

PKn berperan dalam membentuk karakter bangsa agar memiliki jati diri, akan tetapi kenyataan ditemui bahwa penyajian pembelajaran PKn seakan jauh dari tujuannya. Temuan awal dalam pembelajaran PKn diantaranya :

1. Hasil wawancara yang tidak resmi dengan Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si, ketua Program Studi PKn pada Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung, hari Jumat tanggal 20 Januari 2012, menyatakan bahwa penyajian pembelajaran PKn itu harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis siswa. Mengajarkan PKn di SD, SMP, SMA dan Pendidikan Tinggi pasti berbeda. Bagi siswa tingkat SMA harus diberikan kesempatan untuk mereka melakukan analisis hubungan dari konsep dengan kondisi riil di masyarakat atau dengan perkembangan kehidupan masyarakat, bukannya mengajarkan konsep-konsep, itu pasti tidak menarik karena konsep dapat dibaca sendiri. Guru PKn itu kan kebanyakan seperti itu, misalnya apa arti demokrasi ? demokrasi adalah..., saatnya guru PKn harus mengubah teknik mengajar, kreatif dalam penentuan kolaborasi metode mengajar yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan disesuaikan dengan faktor psikologis siswa, agar pembelajaran PKn menarik dan menyenangkan.
2. Hasil wawancara dengan Arif Baskoro siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Sumedang pada hari selasa tanggal 4 September 2012, menyatakan pembelajaran PKn dilaksanakan kurang menantang, membosankan kalau cara guru mengajar hanya berceramah sendirian, siswa hanya mendengarkan saja.
3. Hasil wawancara dengan pengawas SMA yaitu Adang Sujana, M.Pd pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2012, yang menyatakan guru PKn harus berusaha untuk membangun siswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang memiliki akhlak mulia dan berkarakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Usaha ini harus dilakukan dalam proses pembelajaran

PKn. Tetapi kecenderungan guru-guru lebih mengejar materi tersampaikan dari pada pencapaian tujuan PKn yang sebenarnya. Tidak berarti bahwa hanya materi itu yang jadi fokus pemikiran guru tetapi selain itu bagaimana pembentukan karakter dapat terwujud. Memang kenyataan pembelajaran PKn lebih banyak dengan sistem pembelajaran konvensional dari pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan-pendekatan siswa aktif, maka guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan pelaksanaan pembelajaran PKn.

4. Hasil wawancara dengan Drs.Maman Suparman, M.Pd guru PKn SMA Negeri Tomo, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, menyatakan bahwa kurikulum KTSP khususnya bagi matapelajaran PKn dalam silabusnya lebih banyak materi yang penekanannya kepada aspek kognitif, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran guru akan terfokus kepada bagaimana materi itu dapat tersampaikan. Guru PKn seolah-olah dikejar-kejar untuk menyampaikan materi, sehingga guru akan berusaha dengan target yang harus dicapai yaitu menyelesaikan materi, mengabaikan pengembangan aspek sikap, keterampilan siswa. Karena hal tersebut guru didorong untuk melaksanakan pembelajaran dengan cara-cara yang konvensional, dimana guru lebih dominan berceramah ketimbang membelajarkan siswa. Pembelajaran PKn lebih didominasi guru, siswa hanya duduk dengar catat hafal (DDCH).
5. Hasil wawancara dengan Sholihat, S.Pd, guru PKn SMA Negeri Situraja, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, menyatakan bahwa dalam pembelajaran PKn guru akan melaksanakan pembelajaran itu lebih cenderung ke sistem konvensional, karena memang tuntutan dalam silabusnya lebih banyak materi kognitifnya dibandingkan dengan materi yang mengarah ke aspek sikap atau keterampilan. Kedua aspek ini dalam silabusnya tidak nampak, sehingga guru akan terbatas untuk mengembangkan kedua aspek tersebut karena selalu dikejar-kejar materi kognitif takut tidak selesai. Apabila materi selesai maka dianggap pembelajaran telah selesai, padahal dalam mengembangkan aspek sikap dan keterampilan belum selesai. Maka upaya minimalnya yaitu dengan pengamatan perilaku siswa di sekolah serta laporan dari guru-guru mata pelajaran lain tentang sikap dan perilaku siswa tersebut.

6. Hasil dari diskusi dalam pertemuan MGMP PKn pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, menyimpulkan tentang pelaksanaan pembelajaran PKn yang dilakukan para guru PKn selama ini bahwa; pembelajaran PKn dilaksanakan dengan berbagai pendekatan baik itu *jigsaw*, *debat*, tetapi dari hasilnya tetap siswa dituntut harus menguasai pengetahuan tentang PKn, dimana pengetahuan PKn akan diterima melalui guru dengan menggunakan metoda ceramah. Guru PKn lebih banyak melaksanakan pembelajaran dengan sistem konvensional karena materi yang harus disampaikan kepada siswa dalam silabus PKn begitu banyak aspek kognitifnya dibandingkan dengan aspek sikap dan keterampilannya. Apabila dikaji dari tuntutan pembelajaran PKn harus mengembangkan tiga komponen yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*, maka ketiga komponen ini sulit tercapai, selama kurikulum tersebut lebih mengutamakan ke aspek materi pengetahuan.
7. Pemberitaan dalam koran Sumedang Ekspres hari Senin tanggal 1 April 2013, yang berjudul “Kurikulum 2013 Menuntut Kreativitas Guru” mengulas tentang kurangnya kreativitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum KTSP, dimana guru lebih banyak berceramah dalam pembelajaran, siswa hanya sebatas mendengarkan tidak dikembangkan daya nalar dan daya kreativitasnya, yang memungkinkan akan melahirkan generasi penurut, sulit untuk mengembangkan wawasan, sehingga dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk membelajarkan siswa melalui pendekatan *scientific*, guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran yang dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang skenario pembelajaran, baik dalam penentuan materi, metoda, media dan alat evaluasi serta dapat menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan tindak lanjut bagi siswa ataupun bagi pelaksanaan pembelajaran selanjutnya.

Dari hasil wawancara awal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran PKn, cenderung dilakukan dengan cara-cara konvensional. Proses pembelajaran PKn masih berpusat pada guru (*teacher centered*), kurang menekankan kepada proses, materi pelajaran disajikan dalam bentuk informasi, orientasi pada hasil lebih kuat, berpikir kognitif yang rendah, pengembangan

konsep, sikap dan perilaku moral terabaikan, pola pembelajaran satu arah serta cenderung ke arah indoktrinasi. Hal ini berkaitan dengan silabus kurikulum PKn yang lebih dominan menekankan kepada aspek kognitif saja, sehingga persepsi guru PKn hanya terfokus pada bagaimana agar materi dapat tersampaikan secara keseluruhan, mengabaikan peran siswa, bahwa siswa harus dilibatkan dalam pembelajaran. Sebaiknya guru PKn memiliki persepsi bagaimana materi dapat tersampaikan tanpa meninggalkan tujuan pembelajaran PKn yang sebenarnya terutama dalam pengembangan keterampilan dan sikap siswa agar menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa cinta tanah air.

Sejalan dengan pendapat Winataputra dalam bahan Diskusi dan seminar dan Musda AP3PKnI, 9 Maret 2013, tentang Menuju Paradigma Baru PPKn dalam konteks Sistem Kurikulum 2013, yang diadopsi dari *Partnership for 21<sup>st</sup> Century (2008), 21<sup>st</sup> Century Skills, Education, and Competitiveness*; menyatakan bahwa :

‘Kompetensi abad 21 mata pelajaran PKn perlu dibingkai dengan kompetensi pembelajaran dan inovasi pembelajaran, karena belajar itu tidak hanya terbatas dalam lingkungan sekolah saja, sumber belajar banyak di luar lingkungan sekolah. Karena itu pembelajaran PKn perlu dukungan kompetensi dalam pemanfaatan informasi, media dan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan kompetensi inovasi memerlukan dukungan proses pembelajaran yang dapat memperkuat kreativitas melalui kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah’.

Maka hal ini perlu adanya revitalisasi pembelajaran PKn melalui kreativitas guru PKn dalam inovasi pembelajaran, agar PKn tidak menjadi mata pelajaran yang membosankan, tetapi menjadi mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari. Pembelajaran PKn yang diharapkan dimana proses pembelajaran yang diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui partisipasi sosial (*socio-participatory learning*) dan belajar melalui interaksi sosial kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Para siswa dikondisikan untuk selalu bersikap kritis, berperilaku kreatif, cerdas dan baik.

## B. Identifikasi Masalah Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah esensial yang dapat menarik untuk diidentifikasi dan menarik untuk diteliti, diantaranya;

1. PKn sebagai mata pelajaran di SMA, mengemban misi dan tugas sebagai pendidikan demokrasi, akan tetapi dalam proses pembelajarannya masih dilaksanakan secara konvensional dan berpusat kepada guru (*teacher centered*), belum mengembangkan karakter yang sesuai dengan ciri khas PKn, yaitu pengetahuan, keterampilan dan karakter kewarganegaraan. Guru PKn belum secara efektif membangun siswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik, yaitu warga negara yang memiliki akhlak mulia dan berkarakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengantisipasi hal ini, guru PKn harus mampu mengembangkan kompetensi guru pada umumnya serta kompetensi guru PKn khususnya, dalam pembelajaran PKn melalui kreativitas guru dalam melaksanakan inovasi pembelajaran PKn.
2. Proses pembelajaran PKn merupakan program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*), membudayakan (*civilizing*) dan memberdayakan (*empowering*) siswa, sehingga diperlukan adanya interaksi edukasi yang menarik, menantang sebagaimana tuntutan yuridis konstitusional bangsa. Namun dalam realita di sekolah masih banyak yang bersifat instruktif dan otoriter dan didominasi guru. Padahal dalam proses pembelajaran, guru PKn harus banyak melibatkan komponen kompetensi siswa yang meliputi sikap, perasaan, emosi, motivasi dan keterampilan siswa secara utuh. Maka dengan pertimbangan ini guru PKn harus mampu mengimplementasikan kompetensinya melalui pembelajaran PKn yang interaktif, yang dapat mengembangkan komponen-komponen kompetensi siswa.
3. Masyarakat yang sedang berkembang, di Indonesia menuntut partisipasi seluruh komponen bangsa termasuk guru dan siswa di sekolah sebagai agen

perubahan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan kompetensi guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran interaktif memerlukan kepedulian serta peran serta sekolah, masyarakat, serta pemerintah dalam pemenuhannya.

4. Hasil pembelajaran PKn semestinya menghasilkan kompetensi siswa yang berkarakter yakni memiliki nilai-nilai dan norma sosial yang tinggi, seperti *civic knowledge; civic dispositions, civic skills*, artinya memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara aktif dalam kehidupan dirinya dengan keluarga, sekolah dan masyarakat. Namun dalam kondisi sekarang masih berfokus pada kemampuan kognitif. Melalui pembelajaran yang interaktif diharapkan dapat mengembangkan kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, tampak kurang berfungsi maksimal peran guru PKn, dalam mengimplementasikan kompetensinya terutama dalam pengembangan materi ajar, mengkolaborasikan metode pembelajaran atau dalam pemilihan pembelajaran PKn interaktif, menciptakan proses belajar yang menarik, sehingga memperoleh hasil belajar yang berkarakter dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena muara pembelajaran PKn selama ini terdapat dualisme tujuan. Secara akademik siswa harus lulus ulangan dan ujian di sekolah, dilain pihak siswa dituntut berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, partisipatif, berakhlak, bernilai, bermoral, dalam kehidupan mereka baik di sekolah, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM PEMBELAJARAN INTERAKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN” (Studi pada SMA Negeri di Kabupaten Sumedang).

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini yaitu:

**MIMING KARMILAH, 2015**

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DALAM PEMBELAJARAN INTERAKTIF  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bagaimanakah Implementasi Pengembangan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Interaktif PKn ?

Agar penelitian ini lebih terarah pada pokok permasalahan, maka peneliti menjabarkannya dalam beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran PKn ?
2. Bagaimana deskripsi guru melaksanakan pembelajaran PKn yang interaktif sebagai implementasi kompetensi guru?
3. Bagaimana deskripsi interaksi siswa dalam pembelajaran interaktif PKn ?
4. Faktor-faktor apa saja yang dominan dalam implementasi kompetensi guru dalam pembelajaran interaktif PKn ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran interaktif PKn.

##### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis implementasi pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran PKn.
- b. Mendeskripsikan guru melaksanakan pembelajaran PKn yang interaktif sebagai implementasi kompetensi guru.
- c. Mendeskripsikan interaksi siswa dalam Pembelajaran interaktif PKn.
- d. Menganalisis faktor-faktor yang dominan dalam implementasi kompetensi guru dalam pembelajaran interaktif PKn.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara keilmuan (teoretis), maupun secara empirik (praktis), khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca.

### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, temuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi masukan yang berupa prinsip dan teori PKn, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan literatur/bacaan.

### 2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, antara lain :

- a. Bagi penentu kebijakan dan tim pengembang kurikulum PKn, temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum, silabus PKn, serta pembinaan guru PKn yang sejalan dengan kondisi saat ini.
- b. Bagi guru PKn sebagai praktisi pendidikan di lingkungan persekolahan, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rujukan, untuk merancang strategi pembelajaran PKn yang baik dan melaksanakan pembelajaran interaktif PKn yang menggunakan pendekatan, strategi, serta metode yang sesuai dengan bahan pembelajaran PKn, sehingga pembelajaran PKn menjadi bermakna dan menyenangkan di lingkungan pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan Nasional.
- c. Bagi siswa sebagai pembelajar, memperoleh pengalaman ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran interaktif PKn sehingga siswa memahami fungsi, peran dan tanggungjawabnya sebagai generasi muda yang mengemban tugas sebagai generasi penerus yang harus memiliki komitmen kuat dilandasi dengan jiwa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air, dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### F. Struktur Organisasi Disertasi

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah laporan hasil penelitian ini, penulisan disertasi meliputi, Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran. Dalam pemaparan setiap bab, penulis menguraikan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yang memaparkan tentang; Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Struktur Organisasi Disertasi. Bab II Kajian Pustaka, yang mencakup : Pengembangan Kompetensi Guru, yang memaparkan tentang; Karakteristik Guru, Kompetensi Guru PKn, Indikator Kompetensi Guru, Pengembangan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran PKn. Selanjutnya, Model Pembelajaran dalam PKn, yang menerangkan tentang: Model Pembelajaran, Implementasi Model Pembelajaran PKn, Pengembangan Perencanaan Pembelajaran PKn, Pengembangan Proses Pembelajaran PKn, yang memaparkan tentang, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran PKn, Metode Pembelajaran PKn, selanjutnya Pengembangan Penilaian Hasil Pembelajaran PKn, Pembelajaran Interaktif PKn yang memaparkan tentang Karakteristik Pembelajaran Interaktif, Model Pembelajaran Interaktif PKn, Pembelajaran Interaktif PKn dalam Kurikulum 2013. Kemudian penjelasan tentang karakteristik PKn, yang menguraikan tentang; Filosofi, Visi dan Misi PKn, Perkembangan PKn, Fungsi dan Peran PKn, Ruang Lingkup Materi PKn, Analisis SWOT dalam PKn. Hasil Penelitian Terdahulu yang mendukung Penelitian dan Kerangka Pemikiran. Bab III Metodologi Penelitian, yang mencakup: Lokasi dan Subjek Penelitian, Desain Penelitian, Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Proses Pengembangan Instrumen, Teknik Pengumpulan data, Analisis Data serta Proses Analisis Data, selanjutnya Waktu Penelitian. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menyajikan; Deskripsi SMA di Kabupaten Sumedang yang termasuk sekolah kategori ring 1 dan sekolah kategori ring 2, yang mencakup: Fisik Lingkungan, Kepemimpinan, Guru dan Siswa, Sarana dan Prasarana. Deskripsi Hasil Penelitian, memaparkan temuan pada SMA yang termasuk sekolah kategori ring 1 dan sekolah kategori ring 2 yang mencakup : Implementasi pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran PKn, Deskripsi guru melaksanakan pembelajaran PKn yang interaktif sebagai implementasi kompetensi guru, Deskripsi interaksi siswa dalam pembelajaran interaktif PKn, dan Faktor-faktor dominan dalam implementasi kompetensi guru dalam pembelajaran interaktif PKn. Pembahasan Hasil Penelitian, yang memaparkan tentang hasil penelitian

pada sekolah yang termasuk sekolah kategori ring 1 dan sekolah kategori ring 2, meliputi; Implementasi pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran PKn, Deskripsi guru melaksanakan pembelajaran PKn yang Interaktif sebagai implementasi kompetensi guru, Deskripsi interaksi siswa dalam pembelajaran interaktif PKn, dan Faktor-faktor dominan dalam implementasi kompetensi guru dalam pembelajaran interaktif PKn. BAB V Simpulan dan Saran. Selanjutnya Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.